

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Konsep Perilaku Pemilih

Perilaku Pemilih merupakan salah satu bagian dari teori perilaku politik. Teori politik tidak hanya menjelaskan masalah perilaku pemilih, tetapi juga menyangkut masalah sikap politik seseorang, ideologi dan partisipasi. Perilaku pemilih dan partisipasi politik merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Salah satu wujud dari partisipasi adalah kegiatan pemilihan yang menyangkut tentang kampanye, bekerja dalam pemilihan dan mencari dukungan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan tersebut.

Menurut Surbakti (2010, 185) perilaku pemilih adalah keikutsertaan warga Negara dalam pemilihan merupakan serangkaian kegiatan pembuatan keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum ? kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataupun Y.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa perilaku pemilih merupakan suatu tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Namun dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah mengapa seseorang memilih partai atau kandidat tertentu dan bukan partai atau kandidat lainnya. Termasuk perilaku pemilih yang berakibat pada sah atau tidaknya surat suara.

Menurut Firmanzah (2007, 102) pemilih dapat diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mempengaruhi dan meyakinkan agar memberikan suara kepada kontestan yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas menjelaskan dapat dilihat bahwa pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu dan kemudian menerapkan dalam institusi politik seperti partai politik.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2008, 367) perilaku pemilih adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sehingga dengan ikut sertanya dalam pemilihan umum masyarakat juga ikut menentukan untuk lima Tahun kedepan.

2.1.2. Konsep Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah sebuah proses dalam memilih orang-orang yang akan menduduki kursi di pemerintahan. Pemilihan umum diadakan untuk mewujudkan Negara yang demokrasi, dimana pemimpin dipilih berdasarkan suara terbanyak. Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah Negara yang demokratis berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Walaupun setiap warga Negara mempunyai hak untuk memilih, tetapi undang-undang pemilu menetapkan batasan umur untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Adapun batas yang ditetapkan yaitu genap berumur 17 tahun. Batas tersebut ditentukan berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa setiap warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun memiliki pertanggungjawaban politik terhadap Negara dan masyarakat. Sehingga wajar apabila diberikan hak untuk memilih dalam pemilihan umum

Dalam pemilihan umum terdapat beberapa asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih secara langsung dalam pemilu sesuai dengan keinginan diri sendiri.
2. Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga Negara yang memenuhi syarat tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, asal daerah serta status sosial.

3. Bebas artinya setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, bebas menentukan pilihan untuk menyuarakan haknya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.
4. Rahasia artinya dalam menentukan pilihan, pemilih dijamin kerahasiaannya, memberikan suara pada surat suaranya dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur artinya semua pihak yang terkait dalam pemilihan umum harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adil artinya dalam pelaksanaan pemilihan umum, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari segala bentuk kecurangan yang berasal dari pihak manapun.

Menurut Rohaniah dan Efriza (2015, 438) Menegaskan bahwa :

"pemilu merupakan instrumen dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, tentu saja dalam teknis pelaksanaannya membutuhkan aturan-aturan yang spesifik, meski demikian pemilu saja bukanlah merupakan jaminan dari demokrasi itu sendiri akan tetapi pemilu merupakan cara dari didaptkannya legitimasi atas kepercayaan kekuasaan bagi rezim dalam pemerintah".

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa pemilihan umum merupakan suatu bentuk dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan Negara yang demokrasi. Pemilihan umum adalah cara yang dipilih untuk memilih pemimpin.

2.1.3. Konsep Pemilihan Umum Legislatif

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi demokrasi dalam menentukan kepala daerah melalui sistem pemilihan umum. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas sebagai anggota legislatif. Pemilihan legislatif ini sama halnya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan setiap lima tahun sekali.

Penyelenggaraan pemilihan legislatif ini merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain KPU lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemilu adalah Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan suatu lembaga yang bertugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu termasuk pemilihan legislatif agar berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

2.2. Teori

2.2.1. Pendekatan-Pendekatan Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih memiliki hubungan erat dengan pemilih itu sendiri dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Dalam pemilihan politik, pemilih yang satu belum tentu sama dengan pilihan politik lainnya. Menurut Surbakti (2010, 185-187) membedakan beberapa pendekatan antara lain :

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial. Sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap calon kepala daerah. Struktur sosial menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, basis sosial sistem partai dan program-program yang ditonjolkan mungkin berbeda dari suatu Negara karena struktur sosial tersebut.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan serta agama.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Kelompok masyarakat yang menganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, suku dan profesi tertentu yang tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum. Pendekatan ekologis ini penting sekali digunakan karena karakteristik data hasil pemilihan umum setiap tingkat pemilihan berbeda-beda.

4. Pendekatan Psikologi Sosial

Konsep ini yang digunakan untuk menjelaskan perilaku pemilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai yang mempunyai atau tidaknya keterikatan emosional yang dirasakan sangat dekat dengannya dan merupakan partai yang selalu dipilih tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

5. Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya " ongkos "memilih dan kemungkinan suaranya dapat dipengaruhi dari hasil yang diharapkan, tetapi juga dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai kepala daerah. Bagi pemilih pertimbangan untung rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak.

Beberapa beberapa pendekatan diatas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan suatu kegiatan tanpa paksaan dari pihak lain dan berasal dari kemauan sendiri.

Dalam buku memahami Ilmu Politik yang di tulis oleh Surbakti (2010) di sebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang atau aktor politik yaitu.

1. Lingkungan politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi dan media massa.
2. Lingkungan politik langsung yang membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, pendidikan, sekolah dan kelompok pergaulan.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu yang dipengaruhi oleh tiga basis fungsional sikap yaitu kepentingan, dan pertahanan diri, penyesuaian diri.

Ketiga faktor ini saling mempengaruhi aktor politik dalam kegiatan dan perilaku politiknya, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, perilaku politik seseorang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik saja, tetapi juga disebabkan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Di pihak lain terdapat variabel yang mempengaruhi partisipasi politik warga biasa. Dua variabel itu adalah kesadaran politik dan kepercayaan para pemerintah (sistem politik).

Dua variabel tersebut tidaklah berada pada kutub yang berlawanan sekaligus menentukan sikap dan perilaku warga negara dalam berperilaku politiknya, tetapi berada secara integral dan faktor-faktor lain seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman berorganisasi. Status sosial berarti kedudukan seseorang didalam kelompok yang disebabkan baik oleh tingkat pendidikan maupun oleh pekerjaan. Status sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang warga negara dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh pemilik kekayaan. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah.

Selain dari sistem politik yaitu kepercayaan kepada masyarakat, beberapa lingkungan sosial politik yang mempengaruhi perilaku politik ialah keluarga, lingkungan pendidikan/sekolah, agama dan kelompok pergaulan/permainan. Lingkungan-lingkungan sosial itu merupakan lingkungan yang memberikan sumbangan bagi perkembangan pemikiran-pemikiran, norma-norma, nilai-nilai, dan etika pergaulan. Pandangan-pandangan itu memiliki pengaruh dalam kehidupan tingkah laku politik masyarakat.

Struktur kepribadian seseorang yang tercermin dalam sikap individu aktor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik. Perilaku politik itu bergantung kepada sifat struktur kepribadian yang dimilikinya, apakah seseorang aktor politik tersebut memiliki sifat dasar dalam fungsi kepentingan, apakah tergolong dalam fungsi penyesuaian diri atau dalam basis fungsional eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis dasar tersebut mempengaruhi sikap dan tingkah laku politik dalam aktifitas politiknya.

Ketiga faktor tersebut untuk memahami perubahan yang terjadi suatu masyarakat adalah hal yang sulit dalam membahas mengenai perilaku. Karena faktor dapat mempengaruhi aktor yang saling berinteraksi dengan satu dengan yang lain dan mudah untuk berubah. Lingkungan-lingkungan sosial politik tersebut saling mempengaruhi dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan bukannya sebagai faktor yang berdiri sendiri. Melalui proses, pengalaman, sosialisasi, dan sebagainya terbetuklah sikap dan perilaku politik seorang.

2.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Isu-isu kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih, seseorang atau sekelompok orang bisa saja memilih partai politik atau kandidat politik karena dianggap sebagai representasi dari keyakinan tetapi sekelompok orang lainnya memilih karena dianggap dari representasi kelas sosialnya. Menurut Pamungkas (2012: 2) perilaku memilih merupakan aktivitas warga negara berkaitan dengan penggunaan hak politiknya dalam pemilu.

Menurut Asfar (dalam Upe 2008, 117-120) bahwa dalam menganalisis perilaku pemilih atau " voting behavior: dapat digunakan tiga faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih yaitu:

1. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis sering disebut Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behavior*) merupakan faktor yang menekankan pada peran faktor-faktor sosiologis dalam bentuk perilaku politik seseorang. Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari faktor sosiologis tertentu seperti agama, pendidikan, pekerjaan dan ras yang dialami agen pemilihan secara historis. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut memilih atau tidak.

Penegelompokan seperti umur, jenis kelamin, agama dan sebagainya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk kelompok sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi keagamaan, profesi dan sebagainya. Sedangkan kelompok-

kelompok informal seperti keluarga ataupun kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang.

2. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang sering disebut dengan Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research center*) lebih menekankan pada pengaruh faktor psikologis seseorang dalam menentukan pilihan politik. Menurut penganut faktor psikologis, secara metodologis faktor psikologis dianggap sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama dan sebagainya.

Faktor psikologis menjelaskan bahwa sikap seseorang (sebagai refleksi kepribadian seseorang) merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, faktor psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama seperti ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu, orientasi terhadap kandidat.

Para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk untuk proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Melalui proses sosialisasi individu dalam mengenai sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya dalam pemilihan umum. Sosialisasi

bertujuan meningkatkan kualitas pemilih. Pembentukan sikap tidaklah begitu saja terjadi melainkan proses sosialisasi yang berkembang menjadi ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Makin dekat seseorang dengan partai maka semakin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.

3. Faktor Rasional

Kedua faktor diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada dibilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakter sosiologis, latar belakan keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pemilihan politik seseorang.

Tetapi pada kenyataannya ada sebagian pemilih yang memilih untuk mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Hal ini disebabkan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa mengubah referensi pilihan politik seseorang. Ada faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilihan umum. Dengan begitu pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif.

Menurut Nursal (2004, 72) terdapat beberapa indikator yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, antara lain:

- a. *Social imagery* atau citra sosial (pengelompokan sosial) adalah citra kandidat atau partai dalam pikiran pemilih mengenai berada didalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik.
- b. Identifikasi partai yakni proses panjang dalam sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap dari pemilu ke pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama.
- c. *Emotional feeling* (perasaan emosional) adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditujukan oleh *policy* politik yang ditawarkan.
- d. *Candidate personality* (citra kandidat) mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting, yang dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan *candidate personality* adalah arikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegas dan sebagainya.
- e. *Issues and politics* (isu dan kebijakan politik) komponen *issues and politics* mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu. Platform dasar yang sering ditawarkan oleh kontestan pemilu kepada para pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan dalam negeri dan luar negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum dan karakteristik kepemimpinan.

- f. *Current Events* (peristiwa Mutakhir) mengacu pada himpunan peristiwa, isu dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. *Current events* meliputi masalah domestik adalah misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi dan sebagainya. Yang termasuk masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.
- g. *Personal events* (peristiwa personal) mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seseorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang dalam memperjuangkan tanah air dan sebagainya.
- h. *Epistemic issue* (Faktor-faktor epistemik) adalah isu-isu pemilih yang spesifik mengenai hal-hal baru. Epistemic issue sangat mungkin muncul ditengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi institusi politik yang menjadi bagian-bagian dari sistem yang berjalan.

Berdasarkan beberapa indikator diatas dapat dilihat bahwa perilaku pemilih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan status dan golongan kandidat atau partai. Yang dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kandidat serta isu-isu politik yang beredar.

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ini. Dari beberapa contoh judul penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dari segi masalah yaitu mencari tahu tentang faktor faktor yang mempengaruhi pemilih akan tetapi objek dan sarannya yang berbeda.

Penelitian oleh Oki Saputra (2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul "Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ". Mengungkapkan bahwa pemilih berhak menentukan suaranya pada salah satu partai yang mnjadi pilihannya. Dari beberapa contoh judul penelitian terdahulu memang memiliki keterkaitan dari segi permasalahannya yaitu tentang perilaku pemilih pada pemilihan umum. Namun memiliki perbedaan dalam segi lokasi dan objek penelitiannya.

Yustina Kurtatik (2015) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas tanjungpura Pontianak yang berjudul " Perilaku Pemilih Lanjut Usia di Dusun Tokam Desa Thang Raya Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014" mengungkapkan bahwa perilaku pemilih lanjut usia yang bersikap apatis pada pemilihan umum legislatif Tahun 2014 di Dusun Tokam Desa Thang raya Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau. Persamaannya dengan judul yang ingin peneliti teliti memiliki keterkaitan dari segi permasalahannya yaitu tentang perilaku pemilih pada pemilihan umum

legislatif dan yang kedua dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Namun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek dan subjek.

Reni Nurhafizah (2018) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul " Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa di desa Sungai Bundung Laut Tahun 2017" mengungkapkan bahwa faktor sosiologis dan faktor psikologis tidak terlalu mempengaruhi perilaku pemilih, namun faktor rasional menjadi faktor dominan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Persamaannya dengan judul yang peneliti teliti yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih dalam suatu pemilihan, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi dan objek.

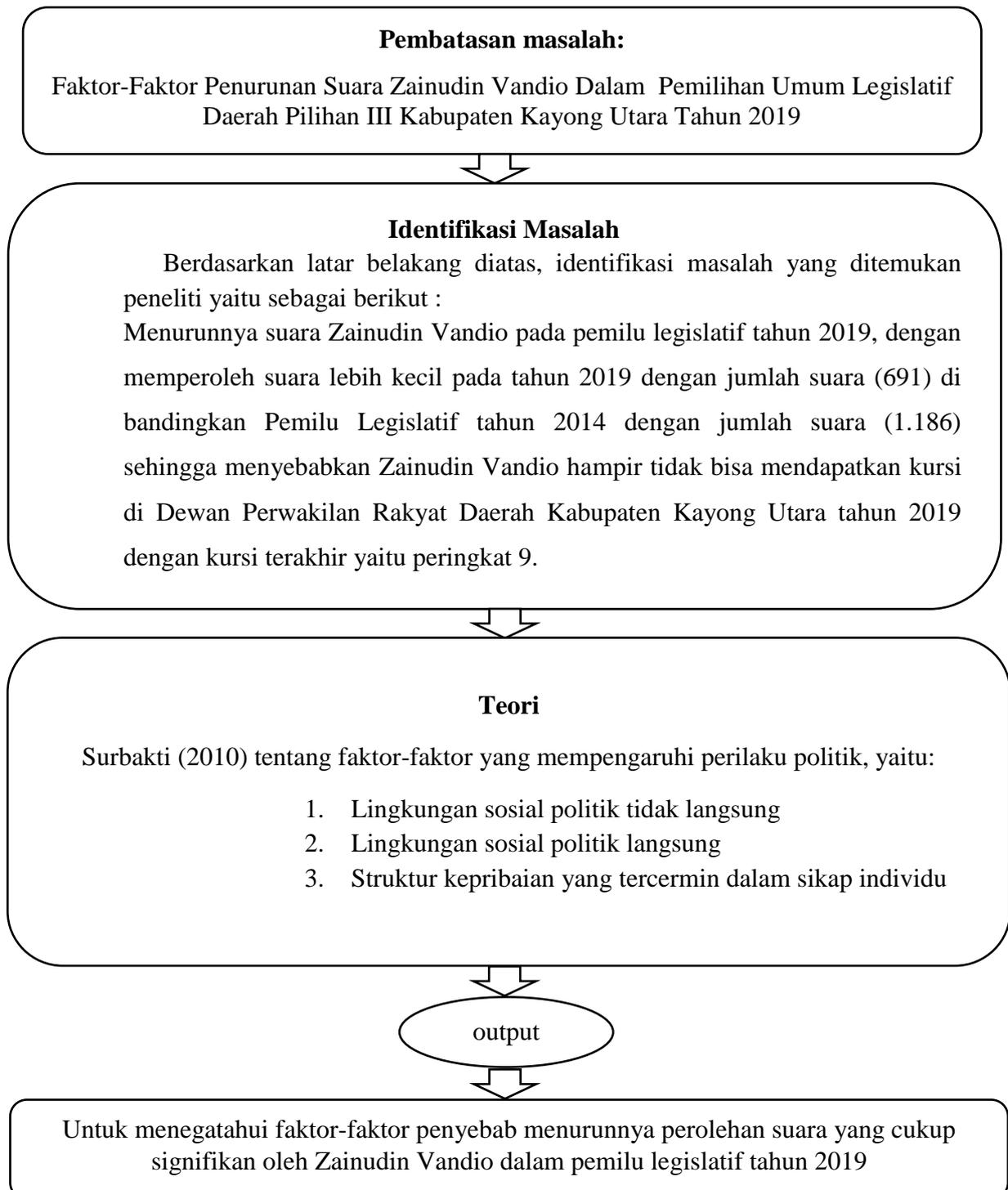
2.4. Kerangka Pikir Penelitian

Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2019 daerah pilihan III Kayong Utara diikuti oleh 108 calon legislatif dan yang lolos menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara sebanyak 9 kursi dari 16 partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatif, pada pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah pilihan III Kabupaten Kayong Utara sebagai Incumbent Zainudin Vandio beliau memperoleh suara cukup jauh perbedaannya pada pemilihan Legislatif tahun 2014 yang menyebabkan zainudin Vandio memperoleh kursi terakhir yaitu kursi kesembilan yang membuatnya hampir tidak mendapatkan kursi di dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan yang menjadi Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah

suara atau menurunnya suara zainudin Vadio pada pemilu Legislatif tahun 2019. Kerangka pikir penelitian ini juga menjelaskan teori yang digunakan adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih menurut surbakti (2010) yaitu Lingkungan sosial politik tidak langsung, Lingkungan sosial politik langsung dan Struktur kepribaian yang tercermin dalam sikap individu, kemudian output atau tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan pemilih dan berharap supaya lebih bijak dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum selanjutnya.

Bagan 2.1

Alur Pikir



2.5. Pertanyaan Penelitian

Adapun beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana lingkungan sosial politik tidak langsung sehingga menyebabkan menurunnya suara Zainudin Vandio pada pemilihan pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah pilihan III tahun 2019?
2. Bagaimana lingkungan sosial politik langsung menjadi penyebab menurunnya suara Zainudin Vandio pada pemilihan pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah pilihan III tahun 2019?
3. Bagaimana struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu menjadi penyebab menurunnya Zainudin Vandio pada pemilihan pemilu Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada daerah pilihan III tahun 2019?